

Katalog: 9199007.1408



2023

LAPORAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BENGKALIS

Volume 1, 2024



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS

Katalog: 9199007.1408

<https://bengkalis.kab.bps.go.id>

LAPORAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BENGKALIS

Volume 1, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS**

LAPORAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BENGKALIS 2023

Volume 1, 2024

Katalog : 9199007.1408

No. Publikasi : 14080.24033

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xiv + 108 Halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis

“Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis.”

TIM PENYUSUN

**Laporan Perekonomian
Kabupaten Bengkalis 2023**
Volume 1, 2024

Pengarah:

Hari Prasetyo, SST, M.Si.

Penanggung Jawab:

Hari Prasetyo, SST, M.Si.

Penyunting:

Cynthia Hazirah Imanina, S.Stat.

Pengolah Data dan Penulis Naskah:

Cynthia Hazirah Imanina, S.Stat.

Surya Kamala, S.Tr.Stat.

Trinanda Yulia Putri, S.Tr.Stat.

Penata Letak:

Surya Kamala, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Publikasi Laporan Perekonomian Kabupaten Bengkalis 2023 ini mencakup analisis yang mengkaji perkembangan ekonomi, struktur ekonomi, dan sumbangan suatu sektor lapangan usaha terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis.

Publikasi ini merupakan publikasi yang difokuskan terhadap penentuan lapangan usaha/ industri unggulan dalam rangka menjamin pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis beberapa tahun terakhir dan beragamnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bengkalis mendorong para stakeholders, peneliti dan pengamat ekonomi untuk menentukan lapangan usaha/industri unggulan di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, publikasi ini akan mengkaji lapangan usaha/industri apa saja yang menjadi lapangan usaha/industri unggulan di Kabupaten Bengkalis.

Publikasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan analisis di masa yang akan datang. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian publikasi ini.



Bengkalis, Desember 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bengkalis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hari Prasetyo', written over a white rectangular area.

Hari Prasetyo, SST, M.Si.

DAFTAR ISI

Laporan Perekonomian Kabupaten Bengkalis 2023

Volume 1, 2024

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	3
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Produk Domestik Regional Bruto	9
2.2 Lapangan Usaha/Kategori.....	13
BAB III METODOLOGI	71
3.1 Sumber Dan Jenis Data	73
3.2 Metode Analisis	74

BAB IV PEMBAHASAN	83
4.1 Gambaran Umum Perekonomian Ekonomi di Kabupaten Bengkulu.....	85
4.2 Potensi Unggulan Kabupaten Bengkulu Menggunakan Location Quotient	88
4.3 Potensi Unggulan Kabupaten Bengkulu Menggunakan Tipologi Klassen.....	89
4.4 Potensi Unggulan Kabupaten Bengkulu Menggunakan Analisis Model Rasio Pertumbuhan	92
4.5 Potensi Unggulan Kabupaten Bengkulu Menggunakan Analisis <i>Shift Share</i>	94
4.6 Potensi Unggulan Kabupaten Bengkulu Menggunakan Analisis <i>Overlay Base Economic Approach</i>	95
 BAB V PENUTUP.....	99
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran	102
 DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Kerangka Kerja Shift Share	80
4.1 Analisis <i>Location Quotient</i> Kabupaten Bengkalis, 2023	88
4.2 Tipologi Klassen Lapangan Usaha Kabupaten Bengkalis, 2023.....	91
4.3 Analisis Model Rasio Pertumbuhan Kabupaten Bengkalis, 2023 .	93
4.4 Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Bengkalis, 2023	94
4.5 Analisis <i>Overlay Base Economic Approach</i> Kabupaten Bengkalis, 2023.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Kerja Tipologi Klassen.....	77
4.1 Distribusi PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha, 2023 (Persen)	86
4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis, 2023 (Persen)	87
4.3 Tipologi Klassen Lapangan Usaha Kabupaten Bengkalis, 2023.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau (Miliar Rupiah), 2023	105
2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau (Persen), 2023	106
3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau (Persen), 2023	107

BAB 1

PENDAHULUAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan publikasi:

01

Memperoleh gambaran perkembangan perekonomian di Kabupaten Bengkalis

Mengetahui lapangan usaha/ industri yang menjadi unggulan di Kabupaten Bengkalis

02

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan penting bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan suatu negara. Hal ini menjadi salah satu masalah utama pembangunan yang dihadapi banyak negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Upaya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi ini ditunjukkan dan dituangkan dalam bentuk keseriusan dan komitmen seluruh negara dengan menjadikannya sebagai salah satu *goal* (tujuan) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tertuang dalam tujuan 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi merupakan rangkaian kebijakan atau usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Beberapa ahli meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan bermanfaat untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang akan menyerap tenaga kerja. Penyerapan ini kemudian diyakini akan memberikan pendapatan untuk masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan dan jurang pendapatan (Todaro, et al [2015]). Dengan kata lain, berbagai negara meyakini dan berusaha memacu pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.



Dalam konteks wilayah yang merupakan bagian dari negara, perekonomian suatu wilayah diukur dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB terdiri dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kedua ukuran inilah yang kemudian biasanya dijadikan patokan untuk menilai perkembangan perekonomian suatu wilayah.

Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten terluas ke-lima di Provinsi Riau. Sumbangan PDRB Kabupaten Bengkalis terhadap perekonomian Provinsi Riau merupakan yang terbesar pertama yakni sebesar 16,39 persen. Tidak seperti sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang potensi utamanya di sektor pertanian, Kabupaten Bengkalis memiliki potensi yang tinggi dalam sektor pertambangan dan penggalan, bahkan dalam sektor ini Kabupaten Bengkalis menjadi penyumbang terbesar untuk Provinsi Riau.

Perbedaan potensi ekonomi Kabupaten Bengkalis dibandingkan kabupaten/kota lain inilah yang menjadi latar belakang mengapa penentuan industri unggulan di Kabupaten Bengkalis menarik untuk dianalisis. Bagaimana kemudian sektor-sektor ini dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, publikasi Laporan Perekonomian Kabupaten Bengkalis 2023 ini sangat penting untuk dilakukan khususnya guna membahas industri unggulan apa yang ada di kabupaten ini.

Penentuan kategori unggulan boleh jadi menentukan arah kebijakan utama pembangunan Kabupaten Bengkalis. Menggali potensi ekonomi terbaik Kabupaten Bengkalis harus dilakukan untuk optimalisasi pembangunan berbasis potensi yang dimiliki. Dengan demikian, diharapkan optimalisasi ekonomi dapat dicapai terutama dengan mendorong pertumbuhan pada industri-industri unggulan dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum perekonomian di Kabupaten Bengkalis tahun 2023?
2. Apakah lapangan usaha/industri yang menjadi unggulan di Kabupaten Bengkalis?

1.3 TUJUAN

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disusun, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran perkembangan perekonomian di Kabupaten Bengkalis.
2. Mengetahui lapangan usaha/industri yang menjadi unggulan di Kabupaten Bengkalis.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi ini terdiri dari 5 bab. BAB I menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah dan tujuan, serta sistematika penulisan. BAB II merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan konsep pertumbuhan ekonomi, cakupan masing-masing kategori lapangan usaha, dan hasil beberapa penelitian yang serupa dengan kajian ini dalam menentukan industri unggulan di suatu daerah. BAB III menjelaskan tentang metodologi, terutama model kuantitatif yang digunakan. BAB IV membahas tentang penentuan lapangan usaha unggulan melalui analisis deskriptif (tabel dan grafik), maupun analisis *Location Quotient*, *Shift Share*, dan *Overlay Base Economic Approach*. BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi.

(BPS, 2016)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TEORI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016)

Pembangunan daerah dilaksanakan guna meminimalisasi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antardaerah. Tujuan pembangunan sendiri haruslah mencakup sasaran berikut, yakni usaha meratakan pembangunan di seluruh daerah agar pembangunan antardaerah merata,



pengarahan pembangunan daerah sesuai kemampuan aspirasi serta potensi daerah untuk kepentingan perkembangan nasional maupun daerah itu sendiri, lanjut mengembangkan hubungan ekonomi antardaerah yang saling menguntungkan agar supaya terjalin ikatan ekonomi yang kuat antardaerah guna mengokohkan kesatuan ekonomi nasional, kemudian yang terakhir yakni membina daerah-daerah minus, perbatasan, serta tanah kritis dengan program khusus (Sanusi, 1987).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita) (Zaris, 1987). Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakikatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrizal, 2013).

PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno, 2005). Sedangkan menurut BPS (2016) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku

dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang mana lebih menitikberatkan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, maupun kota. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

Nasution (2010) dalam Rahman (2015) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran Pemerintah Daerah, serta Tenaga Kerja.

Perubahan tahun dasar dalam penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun PDRB telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2000 menjadi tahun 2010. Tahun dasar ini dilakukan perubahan karena selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi banyak perubahan baik tatanan global maupun lokal yang berpengaruh pada perekonomian nasional maupun daerah. PDRB tahun dasar 2010 ini mengacu pada Sistem Neraca Nasional (SNN) 2008. SNN 2008 merupakan rekomendasi internasional mengenai bagaimana penyusunan ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang mana didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi.



Menurut BPS (2016), salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data PDRB. Beberapa kegunaan data PDRB dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar akan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, ini berlaku sebaliknya.
- b. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- c. Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah.
- d. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- e. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

2.2 LAPANGAN USAHA/KATEGORI

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Usaha ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Kategori usaha ini mencakup

2.2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

a. Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan dari kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dan lain-lain), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dan lain-lain). Keseluruhan komoditas tersebut masuk ke dalam



golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Riau dan Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen dan Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

b. Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh

kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Riau dan Subdit Statistik Hortikultura BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH).

c. Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks



Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

d. **Peternakan**

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dan sebagainya.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar

dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

e. Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran tumbuhan/satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian tumbuhan/satwa liar, baik yang hidup di darat maupun laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Bidang Neraca Wilayah dan Analisis BPS Provinsi Riau. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar serta penangkaran tumbuhan/satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan tumbuhan/satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

2.2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK, Subdit Statistik Kehutanan BPS, dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

2.2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau serta Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan



perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditas pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan Cultivated Biological Resources (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (standing crops) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (standing crops) di awal periode yang disebut sebagai Work-in-Progress (WIP). Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan

produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam, serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori pertambangan minyak, gas (migas) dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM. Data harga/indikator harga juga diperoleh dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan

panas bumi setiap triwulan; data struktur biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan dan Penggalian, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan Indonesia Crude Price (ICP), sedangkan harga gas bumi menggunakan harga pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi.

2.2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. Untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 digunakan dengan cara yang sama seperti pada subkategori pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara diperoleh dari Dinas ESDM Provinsi Riau dan Ditjen Mineral dan Batubara

(Minerba) Kementerian ESDM. Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM; Sedangkan data-data lain yang dibutuhkan diperoleh dari Statistik Pertambangan Non Migas BPS, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

2.2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Subkategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel, kobalt, dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak, dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik Penggalian Tahunan. Sementara itu PDRB triwulan diestimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi (DNP) BPS.

2.2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklun atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat

yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti pengilangan minyak dan gas bumi, yang meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk di sini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19.

2.2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu industri makanan dan industri minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan

produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

2.2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12.

2.2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu industri tekstil dan industri pakaian jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penununan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, serta pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti spre, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15.

2.2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya pemotongan kayu gelondong-an menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16.

2.2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu industri kertas dan barang dari kertas, dan industri pencetakan dan reproduksi media rekaman. Industri kertas dan barang dari kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran, dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

2.2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu industri kimia dan industri farmasi dan obat tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan nonorganik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang

merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri farmasi dan obat tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu, dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

2.2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, dan pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

2.2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen, dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk di sini. KBLI 2009: kode 23.

2.2.3.11 Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bongkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh

produk: hasil industri besi dan baja dasar, hasil penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 24.

2.2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah, dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan, dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26, dan 27.

2.2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam subkategori industri mesin dan perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian, dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28.

2.2.3.14 Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara, dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

2.2.3.15 Industri Furnitur

Industri furnitur mencakup pembuatan mebel dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen, dan keramik. Pengolahan pembuatan mebel adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebel cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31.

2.2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang



dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan, dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data industri pengolahan batubara dan pengilangan minyak dan gas bumi terdiri dari data produksi pengilangan migas diperoleh dari PT Pertamina RU II Dumai dan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Data produksi/indikator produksi industri batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas Kementerian ESDM, kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran BPS, sedangkan indikator harga untuk industri batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas BPS.

Sumber data industri makanan dan minuman sampai dengan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan terdiri dari produksi/indikator produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Data struktur biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK BPS ditambah dengan berbagai survei khusus yang dilakukan DNP BPS.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan industri pengolahan migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk industri batubara sampai dengan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Dalam penghitungan NTB Industri Pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin, dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/ minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol, dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara.

2.2.4.1 Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman, dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per

unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan adalah data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga penjualan dan harga pembangkitan, baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT PLN Wilayah Riau dan Kepri setiap triwulan dan juga Statistik PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga diperlukan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

2.2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan gas alam, gas buatan, uap/air panas, udara dingin, dan produksi es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi, dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pengubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan pengadaan uap/air panas, udara dingin, dan produksi es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan, dan pendistribusian uap dan



air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT PGN Area Pekanbaru setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/ lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses

produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan nilai tambah bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan, dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan sampah/limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan, dan pembersihan sampah dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber data produksi adalah Statistik Air Bersih dari Subdit Statistik Pertambangan dan Energi BPS, APBD (Pemerintah Provinsi Riau), data output sampah diperoleh dari Subdit Statistik IBS BPS, data harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS, serta data struktur biaya diperoleh dari Survei Tahunan Air Bersih BPS.

2.2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek, dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain konstruksi gedung tempat tinggal; konstruksi gedung bukan tempat tinggal; konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium;

pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan output harga konstan, output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara diperoleh dengan menggunakan metode commodity flow beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan konsumsi antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Riau, produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas Kementerian ESDM, realisasi pengadaan semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor BPS dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar BPS. Indeks konstruksi dari Subdirektorat Statistik Konstruksi BPS.

2.2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, dan pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, department store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.2.7.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang atau "commodity flow approach". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri dan luar wilayah. Kemudian output atau margin



perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di deflate menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

Sumber data yang digunakan dalam kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah data output barang dari komoditi flow pertanian dan industri domestic serta impor barang dari Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Riau, IHK dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau, dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS, seperti SKSJ dan SKNP.

2.2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

2.2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan charter/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pengangkutan darat dan hasil Sensus

Ekonomi. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Pekanbaru dan Dumai, serta Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari survei terhadap perusahaan angkutan laut, serta IHK jasa angkutan laut dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba dari perusahaan pengangkutan laut dan hasil Sensus Ekonomi.

2.2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT ASDP Indonesia.

2.2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Provinsi Riau.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura II (Pekanbaru) dan Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/ km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan maskapai lainnya, serta IHK jasa angkutan udara dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.2.8.6 Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti PT Angkasa Pura II (Pekanbaru), PT Pelabuhan Indonesia Pekanbaru dan Dumai, dan beberapa perusahaan lainnya. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan



akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata BPS.

2.2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran self service atau restoran take away, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi subkategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial

Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi), telekomunikasi, pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd-rom, buku referensi, dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan

musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi, dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri



informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS, perusahaan di bidang televisi dan teknologi informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi go public seperti PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT Bakrie Telecom; dan PT Smartfren Telecom. Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat utang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil, dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia)

dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan jasa moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDRB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Kantor Pusat Bank Indonesia.

2.2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan Dana Pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

a. Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung risiko-risiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil underwriting, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

b. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK)

umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan leasing, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

a. Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga

Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari OJK Provinsi Riau, PT Pegadaian, dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

b. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk finance lease untuk digunakan oleh penyewa (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh

dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga pembiayaan diperoleh dari OJK Provinsi Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

c. Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan modal ventura diperoleh dari OJK Provinsi Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

a. Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia Perwakilan Riau yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI Perwakilan Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

b. Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi untuk output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

c. Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah

Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

e. Wali Amanat

Wali amanat (trustee) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

f. Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (money changer) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

g. Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga



Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi terkait. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ) BPS.

2.2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

a. Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

b. Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan, dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

c. Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

d. Periklanan

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

e. **Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil**

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

f. **Jasa Penyaluran Tenaga Kerja**

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

g. **Jasa Kebersihan Umum Bangunan**

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini meskipun dilakukan oleh badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari realisasi APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (K1, K2, K3), BPS; realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional XII Pekanbaru.

2.2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB jasa pendidikan pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk jasa pendidikan swasta menggunakan pendekatan produksi. Untuk NTB jasa pendidikan pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa pendidikan swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari realisasi APBN/APBD; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Agama; Dinas Pendidikan Provinsi Riau; berbagai survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Pengeluaran BPS; Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit



dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup jasa rumah sakit; jasa klinik; jasa rumah sakit lainnya; praktik dokter; jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis; jasa pelayanan kesehatan tradisional; jasa pelayanan penunjang kesehatan; jasa angkutan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation); jasa kesehatan hewan; jasa kegiatan sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); berbagai survei khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS; dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa

Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

a. Jasa Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/ kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ ekstrapolasi dengan deflator/ ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/ indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi jasa kesenian, hiburan dan rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Balai Taman Nasional, dan data penunjang intern BPS (ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen,

dan survei-survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

b. Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk, Susenas, Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Riau, dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau).

c. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, sopir, dan sejenisnya), dan Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

(di dalamnya termasuk kegiatan pertanian, industry pengolahan, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, sopir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga/SKITIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu Susenas, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk, Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Riau (Publikasi Statistik Air Bersih), dan survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran BPS.

d. Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, badan regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund (IMF), The World Bank (WB), The World Health Organization (WHO), The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), dan lain-lain.

<https://bengkaliskab.bps.go.id>

BAB 3

METODOLOGI

METODE ANALISIS

1. Deskriptif



2. Location Quotient

3. Tipologi Klassen



4. Shift Share

5. Model Rasio Pertumbuhan



6. Overlay Base
Economic Approach

BAB III METODOLOGI

Metodologi pada publikasi ini secara sederhana disajikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu sumber data dan metode penghitungan. Kedua hal tersebut akan dijabarkan secara rinci pada penjelasan di bawah ini.

3.1 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari website Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dengan rincian variabel sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam Miliar Rupiah
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam Miliar Rupiah
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dalam Persen

Memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur dari perubahan relatif yang terjadi pada PDRB ADHK saat ini (t) dibandingkan periode sebelumnya ($t-1$).

Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa.

4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Persen
Menunjukkan peranan/sumbangan nilai tambah bruto (NTB) setiap sektor ekonomi terhadap PDRB pada periode tertentu.

3.2 Metode Analisis

3.2.1 Analisis Deskriptif

Pada bagian analisis deskriptif akan diberi gambaran pergerakan Pertumbuhan ekonomi dan distribusi PDRB di tahun 2023 dengan menggunakan visualisasi grafik.

3.2.2 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Selain analisis deskriptif (tabel dan grafik), untuk melihat lapangan usaha/industri-industri unggulan di Kabupaten Bengkalis digunakan pula analisis *Location Quotient*. Analisis ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah. Dengan kata lain, Industri-industri apa saja yang merupakan lapangan usaha basis atau *leading sector* di suatu daerah.

Analisis LQ dihitung dengan melakukan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah terhadap kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Dalam hal ini, daerah yang menjadi acuan adalah Provinsi Riau. Sebagai ukuran kemampuan suatu daerah digunakan PDRB ADHB sebagai indikator produksi.

Analisis ini sudah cukup menggambarkan bagaimana perbandingan relatif peran suatu lapangan usaha di Kabupaten Bengkalis dibandingkan dengan lapangan usaha yang sama di level Provinsi Riau. Adapun formula yang digunakan untuk menghitung perbandingan kemampuan/peran industri tertentu dari suatu daerah adalah:

$$LQ_i = \frac{\frac{NTB_{B_i}}{PDRB_ADHB_{B_i}}}{\frac{NTB_{R_i}}{PDRB_ADHB_{R_i}}} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

- NTB_{B_i} : Nilai Tambah Bruto suatu lapangan usaha i di Kabupaten Bengkalis
- $PDRB_ADHB_{B_i}$: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bengkalis
- NTB_{R_i} : Nilai Tambah Bruto suatu lapangan usaha i di Provinsi Riau
- $PDRB_ADHB_{R_i}$: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Riau

Dari perhitungan *Location Quotient* (LQ) suatu lapangan usaha, kriteria umum yang dihasilkan adalah:

- a. Jika $LQ > 1$, disebut sektor basis, yaitu industri yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi dari pada Provinsi Riau.
- b. Jika $LQ < 1$, disebut sektor non-basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari pada Provinsi Riau.
- c. Jika $LQ = 1$, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan Provinsi Riau.

Location Quotient (LQ) memiliki keunggulan berupa kesederhanaan dan kemudahan dalam proses penghitungan. Sehingga, LQ dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya. Namun demikian, perlu diketahui bahwa nilai LQ sangat dipengaruhi oleh berbagai

faktor di antaranya penentuan pemilihan tahun dan kualitas data.

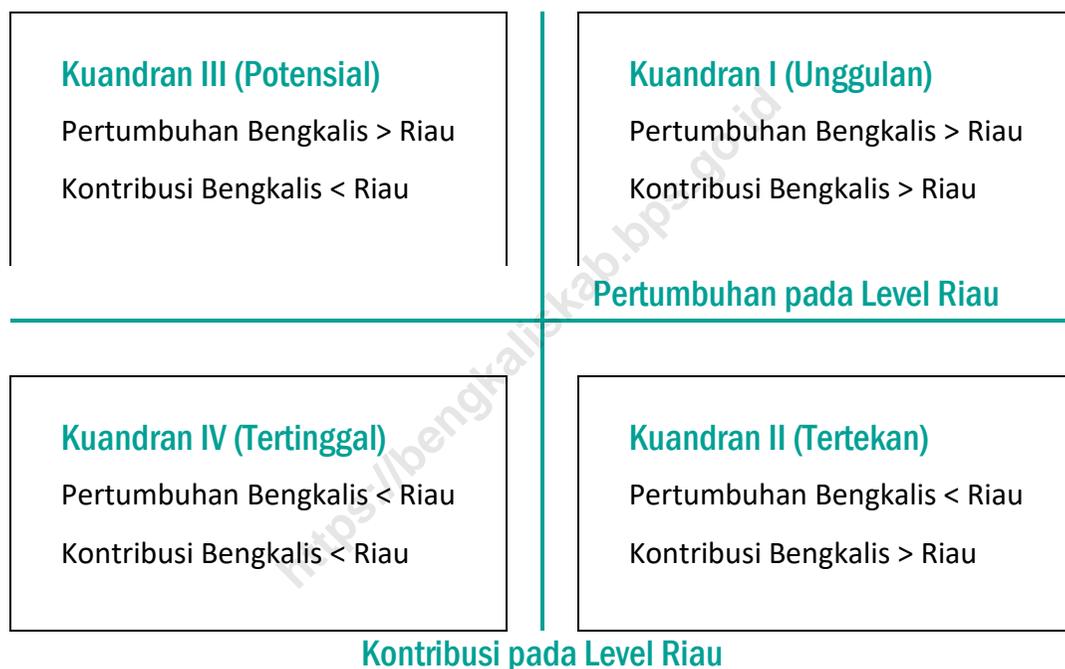
3.2.3 Analisis Tipologi Klassen

Untuk menentukan suatu sektor unggulan dan menguatkan hasil analisis LQ sebelumnya, bisa digunakan analisis tipologi Klassen menggunakan data output wilayah (PDRB). Jika analisis LQ menekankan suatu sektor dikatakan sebagai sektor unggulan bergantung pada perbandingan relatif kontribusi suatu sektor di suatu wilayah dibandingkan daerah acuan. Maka, analisis tipologi Klassen bergantung kepada 2 aspek yaitu kontribusi output dan pertumbuhannya.

Sebagai sumbu X-nya digunakan data kontribusi PDRB suatu kategori terhadap total PDRB suatu wilayah. Sumbu Y-nya adalah laju pertumbuhan ekonomi suatu kategori yang menjadi fokus analisis. Titik potong kedua sumbu tersebut adalah kontribusi suatu kategori untuk Provinsi Riau dan pertumbuhan ekonomi kategori tersebut untuk Provinsi Riau. Dengan demikian seluruh angka daerah Kabupaten Bengkalis akan dibandingkan dengan angka Provinsi Riau. Angka lapangan usaha tertentu yang melebihi angka Provinsi Riau, diduga mempunyai potensi yang lebih besar secara ekonomi dibanding dengan kondisi di level Provinsi Riau ataupun daerah lainnya.

Intinya pada analisis Klassen, yang terletak pada kuadran I adalah menunjukkan sektor tersebut unggulan, sedangkan yang terletak pada kuadran II dan III menunjukkan sektor tersebut sektor potensial. Kuadran IV menunjukkan sektor yang dianalisis tidak menunjukkan keunggulan dan tidak potensial. Bisa diartikan pada kuadran IV, sektor yang dimaksud sulit untuk dikembangkan atau memang belum pernah digali.

Data yang digunakan pada analisis tipologi Klassen adalah persentase kontribusi suatu sektor yang dianalisis dan pertumbuhannya. Sebagai pembanding dipakai kontribusi dan pertumbuhan sektor/kategori yang sama level Provinsi Riau. Lapangan-lapangan usaha di kuadran I dapat dijadikan *leading sector* atau unggulan yang mampu mendorong perekonomian Kabupaten Bengkalis.



Gambar 3.1
 Kerangka Kerja Tipologi Klassen

3.2.4 Analisis Model Rasio Pertumbuhan

Analisis lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan sektor unggulan adalah Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Analisis ini bertumpu pada perbandingan laju pertumbuhan suatu kategori di Kabupaten Bengkalis dengan kategori yang sama di Provinsi Riau. MRP terdiri atas Rasio Pertumbuhan Sektoral (RPS) dan Rasio Pertumbuhan

Regional (RPR). Keterbandingan laju pertumbuhan itu dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I, jika nilai RPS > 1 dan RPR > 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama tinggi \rightarrow sektor tersebut merupakan potensi baik di tingkat Kabupaten Bengkalis maupun Provinsi Riau.
- b. Klasifikasi II, jika nilai RPS < 1 dan RPR > 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih rendah dari wilayah referensi \rightarrow sektor tersebut merupakan potensi di tingkat Provinsi Riau namun di tingkat Kabupaten Bengkalis tidak berpotensi.
- c. Klasifikasi III, jika nilai RPS > 1 dan RPR < 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih tinggi dari wilayah referensi \rightarrow sektor tersebut merupakan potensi di tingkat Kabupaten Bengkalis namun di tingkat Provinsi Riau tidak berpotensi.
- d. Klasifikasi IV, jika nilai RPS < 1 dan RPR < 1 maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama rendah \rightarrow sektor tersebut tidak berpotensi baik di tingkat Kabupaten Bengkalis maupun Provinsi Riau.

3.2.5 Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* dimanfaatkan untuk kepentingan keterbandingan antar suatu wilayah dengan wilayah yang lebih luas cakupannya. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah Kabupaten Bengkalis dengan wilayah Provinsi Riau. Dengan demikian dapat diketahui pergeseran (*shift*) antar sektor antar wilayah untuk diamati sebagai keunggulan dari wilayah

tersebut. Berikut beberapa indikator yang perlu dihitung dalam melakukan analisis *Shift Share* (Maspaitella, Parinussa, Tewernussa; 2021):

- a. Perubahan PDRB kategori *i* di Kabupaten Bengkalis (D_{ij}) atau *shift share* (SS).

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

- b. Perubahan PDRB kategori *i* di Kabupaten Bengkalis yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis (N_{ij}) atau *regional share* (RS).

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot R_R \dots \dots \dots (3)$$

- c. Perubahan PDRB kategori *i* di Kabupaten Bengkalis yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (M_{ij}) atau *proportional shift* (PS).

$$M_{ij} = E_{ij} \cdot (R_{iR} - R_R) \dots \dots \dots (4)$$

- d. Perubahan PDRB kategori *i* di Kabupaten Bengkalis yang disebabkan oleh keunggulan pangsa wilayah kategori tersebut di Kabupaten Bengkalis (C_{ij}) atau *differential shift* (DS).

$$C_{ij} = E_{ij} \cdot (R_{ij} - R_{iR}) \dots \dots \dots (5)$$

Dimana:

- E_{ij} : PDRB kategori *i* di Kabupaten Bengkalis
- R_{ij} : Pertumbuhan PDRB kategori *i* di Kabupaten Bengkalis
- R_{iR} : Pertumbuhan PDRB kategori *i* di Provinsi Riau
- R_R : Pertumbuhan PDRB Provinsi Riau

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, struktur perubahan ekonomi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Jika $M_{ij} > 0$, maka kategori i di Kabupaten Bengkalis memiliki daya saing yang baik dibandingkan pada level nasional. Jika $M_{ij} < 0$, maka kategori i di Kabupaten Bengkalis tidak memiliki daya saing yang baik dibandingkan pada level Provinsi Riau.
- b. Jika $C_{ij} > 0$, maka kategori i di Kabupaten Bengkalis bertumbuh cepat. Jika $C_{ij} < 0$, maka kategori i di Kabupaten Bengkalis bertumbuh secara lambat.

Dampak perubahan dari pergeseran proporsional (M_{ij}) dan pergeseran pangsa wilayah (C_{ij}) dapat digambarkan dalam sebuah matriks empat kuadran agar mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi kategori. Sumbu X merupakan perubahan proporsional (M_{ij}) dan sumbu Y merupakan perubahan pangsa wilayah (C_{ij}). Berikut penjelasan setiap kuadran dari matriks *Shift Share* tersebut:

Tabel 3.1
Kerangka Kerja *Shift Share*

	$C_{ij} < 0$	$C_{ij} > 0$
$M_{ij} > 0$	Kuadran III: Pertumbuhan cepat dan tidak memiliki daya saing	Kuadran I: Pertumbuhan cepat dan memiliki daya saing
$M_{ij} < 0$	Kuadran IV: Pertumbuhan lambat dan tidak memiliki daya saing	Kuadran II: Pertumbuhan lambat dan memiliki daya saing

3.2.6 Analisis *Overlay Base Economic Approach*

Selain menggunakan analisis LQ dan tipologi Klassen, untuk menentukan lapangan usaha unggulan bisa dilakukan dengan analisis *overlay base economic approach*. Analisis ini merupakan skoring dari kombinasi analisis LQ, *shift-share*, model rasio pertumbuhan dan tipologi Klassen.

Dalam analisis *overlay base economic approach*, dari setiap analisis di dalamnya dilakukan skoring untuk sektor-sektor unggulan. Pada tahap LQ, sektor dikatakan unggulan jika mempunyai nilai LQ di atas 1, dan diberi skor 1. Untuk tahap *shift-share*, sektor yang mempunyai daya saing tinggi diberi skor 1, sedangkan untuk model rasio pertumbuhan suatu sektor dikatakan unggulan jika mempunyai pertumbuhan yang baik dalam wilayah analisis maupun wilayah referensi, dan diberi skor 1. Pada tipologi Klassen, sektor yang mempunyai kontribusi dan pertumbuhan lebih dari Provinsi Riau dikatakan sebagai sektor unggulan dan diberi skor 1.

Selanjutnya, dari hasil skoring LQ, *shift-share*, model rasio pertumbuhan dan tipologi Klassen dijumlahkan untuk melihat skor tertinggi. Kategori/sektor yang mempunyai skor tertinggi merupakan sektor unggulan menurut *overlay base economic approach*. Artinya, lapangan usaha itu benar-benar diunggulkan dari berbagai macam metode. Penggabungan beberapa metode, ini dimaksudkan karena suatu lapangan usaha bisa saja tidak nampak keunggulannya, tetapi dengan metode lainnya nampak keunggulannya.



Suatu metode mungkin ada kelemahan, sehingga perlu disempurnakan dengan metode yang lain. Sebagai contoh, ketika suatu usaha yang jumlah tenaga kerjanya sedikit tetapi mempunyai output yang besar, tidak akan tertangkap oleh metode LQ menurut jumlah usaha, padahal dari sisi kontribusi terhadap output wilayah cukup besar. Output yang besar itu akan tertangkap pada metode shift-share dan tipologi Klassen.

<https://bengkaliskab.bps.go.id>

BAB 4

PEMBAHASAN

Berdasarkan Analisis Overlay Base Economic Approach

Sektor Unggulan

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E)



Informasi dan
Komunikasi (J)



Pertambangan dan
Penggalian (B)

**Sektor
Potensi**



Jasa Lainnya
(R,S,T,U)



Administrasi Pemerintah,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib (O)

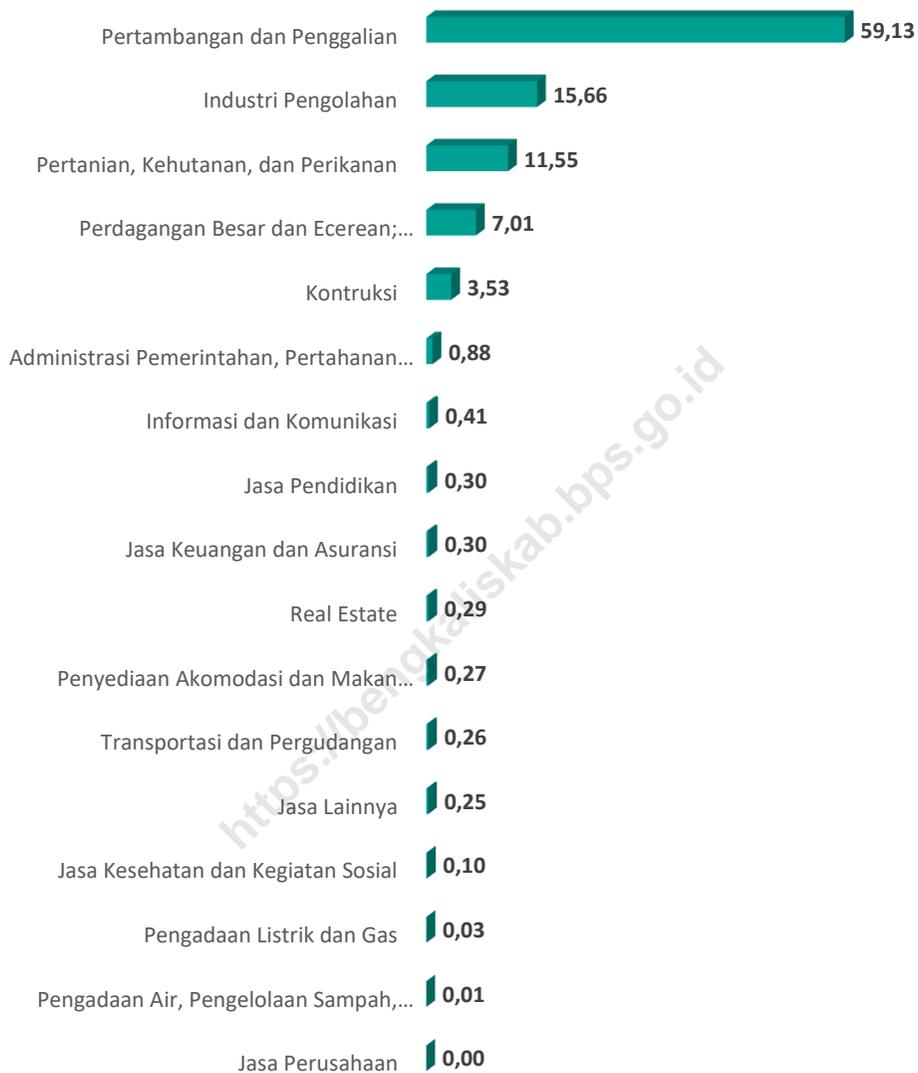
BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Bengkalis

Perekonomian Kabupaten Bengkalis tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 168,64 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 77,98 triliun. Kabupaten Bengkalis berada pada urutan pertama dalam hal sumbangan PDRB terhadap Provinsi Riau.

Pada tahun 2023 struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu Pertambangan dan Penggalian (B); Industri Pengolahan (C); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (G); dan Konstruksi (F). Hal ini dapat dilihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bengkalis.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 adalah dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (B), yaitu mencapai 59,13 persen disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan (C) sebesar 15,66 persen, diikuti oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) sebesar 11,55 persen. Sementara itu, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (G) sebesar 7,01 persen dan lapangan usaha Konstruksi (F) sebesar 3,53 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, diolah

Gambar 4.1
Distribusi PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut
Lapangan Usaha, 2023 (Persen)

Pada tahun 2023 ekonomi Bengkalis (termasuk migas) tumbuh 2,77 persen. Berdasarkan lapangan usaha yang menyusun perekonomian Bengkalis, semuanya tumbuh positif. Industri Pengolahan (C) menjadi lapangan usaha yang tumbuh paling kecil sebesar 1,21 persen sedangkan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E) tumbuh paling tinggi yaitu 10,86 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, diolah

Gambar 4.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis, 2023 (Persen)

4.2 Potensi Unggulan Kabupaten Bengkalis Menggunakan *Location Quotient*

LQ digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) suatu wilayah. Jika suatu sektor mempunyai angka $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor basis/unggulan, sebaliknya jika suatu sektor mempunyai angka $LQ < 1$ maka sektor tersebut sektor nonbasis/bukan unggulan. Suatu sektor dikatakan sektor basis mengindikasikan sektor tersebut merupakan sektor unggulan/potensial, yang berpotensi ekspor.

Tabel 4.1
Analisis *Location Quotient* Kabupaten Bengkalis, 2023

Kategori	Uraian	Distribusi (%)		LQ	Kesimpulan
		Bengkalis	Riau		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,55	26,30	0,44	Non Basis
B.	Pertambangan dan Penggalian	59,13	19,78	2,99	Basis
C.	Industri Pengolahan	15,66	27,55	0,57	Non Basis
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,08	0,39	Non Basis
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	1,18	Basis
F.	Konstruksi	3,53	9,69	0,36	Non Basis
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,01	10,26	0,68	Non Basis
H.	Transportasi dan Pergudangan	0,26	0,83	0,31	Non Basis
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27	0,47	0,58	Non Basis
J.	Informasi dan Komunikasi	0,41	0,80	0,51	Non Basis
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,30	0,94	0,31	Non Basis
L.	Real Estate	0,29	0,83	0,35	Non Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,74	Non Basis
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,88	1,29	0,68	Non Basis
P.	Jasa Pendidikan	0,30	0,49	0,61	Non Basis
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,10	0,24	0,42	Non Basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,25	0,43	0,58	Non Basis

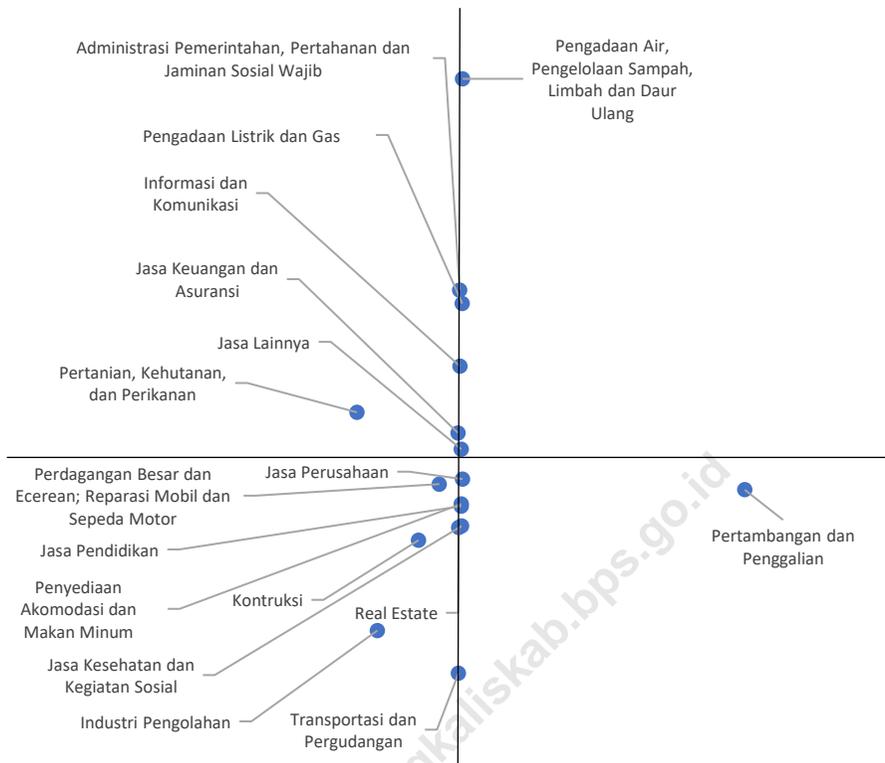
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, diolah

Hasil pengolahan LQ di Kabupaten Bengkalis didapatkan dua kategori yang memiliki nilai LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$) yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian (B) dan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E). Hal ini menunjukkan bahwa dua kategori tersebut merupakan sektor basis di Kabupaten Bengkalis. Sementara itu, kategori-kategori lain memiliki LQ kurang dari satu ($LQ < 1$) yang menunjukkan bahwa kategori-kategori ini bukanlah merupakan sektor basis di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil analisis LQ kategori Pertambangan dan Penggalian, subkategori yang menjadi basis ekonomi Kabupaten Bengkalis terbesar. Kontribusi lapangan usaha ini sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kabupaten Bengkalis bahkan di tingkat Provinsi Riau. Hampir sebagian besar sumur minyak mentah di Provinsi Riau berada di Kabupaten Bengkalis.

4.3 Potensi Unggulan Kabupaten Bengkalis Menggunakan Tipologi Klassen

Untuk menentukan suatu sektor unggulan dan menguatkan hasil analisis LQ sebelumnya, digunakan analisis tipologi Klassen yang menggunakan data distribusi dan pertumbuhan Nilai Tambah Bruto (NTB). Jika analisis LQ menekankan suatu sektor dikatakan sebagai sektor unggulan bergantung pada perannya terhadap perekonomian, pada analisis tipologi Klassen bergantung kontribusi output dan pertumbuhannya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu, diolah

Gambar 4.3
Tipologi Klassen Lapangan Usaha Kabupaten Bengkulu, 2023

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas dapat diperoleh informasi bahwa kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (E) tergolong sektor unggulan. Kategori Pertambangan dan Penggalian (B) tergolong sektor tertekan. Hal ini menunjukkan bahwa kategori ini meskipun memiliki kontribusi yang relatif cukup besar, namun lajunya cukup tertekan. Sebagaimana yang diketahui, kategori pertambangan dan penggalian cukup tertekan beberapa tahun terakhir karena produksi minyak yang terus mengalami penurunan. Sementara itu, potensi di Kabupaten Bengkulu diantaranya ada pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A), Pengadaan Listrik dan Gas (D), Informasi dan Komunikasi (J), Jasa Keuangan dan Asuransi (K), Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O), dan Jasa Lainnya (R, S, T, U). Kategori ini mampu tumbuh lebih baik dibandingkan Provinsi Riau akan tetapi kontribusinya masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan kondisi di Provinsi Riau sehingga tergolong dalam sektor sedang berkembang. Penggolongan setiap kategori lapangan usaha untuk setiap kuadran nya dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah.

Tabel 4.2
Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Bengkalis, 2023

	Kontribusi Bengkalis < Riau	Kontribusi Bengkalis > Riau
Pertumbuhan Bengkalis > Riau	Kuadran III: Potensial <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Pengadaan Listrik dan Gas - Informasi dan Komunikasi - Jasa Keuangan dan Asuransi - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib - Jasa Lainnya 	Kuadran I: Unggulan <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Pertumbuhan Bengkalis < Riau	Kuadran IV: Tertinggal <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pengolahan - Kontruksi - Perdagangan Besar dan Ecerean; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - Transportasi dan Pergudangan - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - Real Estate - Jasa Perusahaan - Jasa Pendidikan - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 	Kuadran II: Tertekan <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan dan Penggalian

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, diolah

4.4 Potensi Unggulan Kabupaten Bengkalis Menggunakan Analisis Model Rasio Pertumbuhan

Analisis lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan sektor unggulan adalah Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Analisis ini bertumpu pada perbandingan laju pertumbuhan suatu kategori di Kabupaten Bengkalis dengan kategori yang sama di Provinsi Riau. MRP terdiri atas Rasio Pertumbuhan Sektoral (RPS) dan Rasio Pertumbuhan Regional (RPR). Keterbandingan laju pertumbuhan itu dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I, jika nilai $RPS > 1$ dan $RPR > 1$ maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama tinggi → sektor tersebut merupakan potensi baik di tingkat Kabupaten Bengkalis maupun Provinsi Riau.
- b. Klasifikasi II, jika nilai $RPS < 1$ dan $RPR > 1$ maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih rendah dari wilayah referensi → sektor tersebut merupakan potensi di tingkat Provinsi Riau namun di tingkat Kabupaten Bengkalis tidak berpotensi.
- c. Klasifikasi III, jika nilai $RPS > 1$ dan $RPR < 1$ maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis lebih tinggi dari wilayah referensi → sektor tersebut merupakan potensi di tingkat Kabupaten Bengkalis namun di tingkat Provinsi Riau tidak berpotensi.
- d. Klasifikasi IV, jika nilai $RPS < 1$ dan $RPR < 1$ maka pertumbuhan sektor i di wilayah analisis dan wilayah referensi sama-sama rendah → sektor tersebut tidak berpotensi baik di tingkat Kabupaten Bengkalis maupun Provinsi Riau.

Tabel 4.3
Analisis Model Rasio Pertumbuhan Kabupaten Bengkalis, 2023

	RPS < 1	RPS > 1
RPR > 1	Klasifikasi II <ul style="list-style-type: none"> - Kontruksi - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - Transportasi dan Pergudangan - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - Jasa Perusahaan - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 	Klasifikasi I <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang - Informasi dan Komunikasi - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib - Jasa Lainnya
RPR < 1	Klasifikasi IV <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan dan Penggalian - Industri Pengolahan - Real Estate - Jasa Pendidikan 	Klasifikasi III <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Pengadaan Listrik dan Gas - Jasa Keuangan dan Asuransi

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas terlihat bahwa kategori yang memiliki nilai RPR dan RPS lebih besar dari satu adalah kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E), Informasi dan Komunikasi (J), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O), dan Jasa Lainnya (RSTU). Hal ini menunjukkan bahwa empat kategori tersebut memiliki potensi yang baik di Kabupaten Bengkalis maupun Provinsi Riau.

4.5 Potensi Unggulan Kabupaten Bengkalis Menggunakan Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* digunakan untuk mengetahui struktur perubahan ekonomi yang dibandingkan terhadap level yang lebih tinggi. Dalam hal ini, perubahan ekonomi Kabupaten Bengkalis menggunakan level Provinsi Riau sebagai pembandingnya. Berbeda dari beberapa teknis analisis sebelumnya, analisis *shift share* bergantung pada indikator pergeseran proporsional (M_{ij}) dan pergeseran pangsa wilayah (C_{ij}). Kondisi pertumbuhan ekonomi kategori dapat digambarkan dalam sebuah matriks empat kuadran. Untuk mengetahui perbandingan sektor ekonomi Kabupaten Bengkalis terhadap kategori pada level Provinsi Riau, dilakukan analisis *shift share* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4
Analisis *Shift Share* Kabupaten Bengkalis, 2023

Kuadran II	Kuadran I
<ul style="list-style-type: none">- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan- Pengadaan Listrik dan Gas- Jasa Keuangan dan Asuransi	<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang- Informasi dan Komunikasi- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib- Jasa Lainnya
Kuadran III	Kuadran IV
<ul style="list-style-type: none">- Kontruksi- Perdagangan Besar dan Ecerean; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor- Transportasi dan Pergudangan- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum- Jasa Perusahaan- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Pertambangan dan Penggalian- Industri Pengolahan- Real Estate- Jasa Pendidikan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas terlihat bahwa kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (E), Informasi dan Komunikasi (J), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O), dan Jasa Lainnya (R, S, T, U) tergolong Kuadran I. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A), Pengadaan Listrik dan Gas (D), dan Jasa Keuangan dan Asuransi (K) tergolong Kuadran II. Kategori Kontruksi (F), Perdagangan Besar dan Ecerean; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G), Transportasi dan Pergudangan (H), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I), Jasa Perusahaan (M, N), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q) tergolong Kuadran III. Kategori Pertambangan dan Pengalihan (B), Industri Pengolahan (C), Real Estate (L), dan Jasa Pendidikan (P) tergolong Kuadran IV.

4.6 Potensi Unggulan Kabupaten Bengkalis Menggunakan Analisis *Overlay Base Economic Approach*

Selain menggunakan analisis LQ, tipologi Klassen, dan *Shift Share*, untuk menentukan sektor unggulan dapat juga dilakukan dengan analisis *overlay base economic approach*. Analisis ini merupakan hasil kombinasi dari analisis LQ, *Shift Share* dan tipologi Klassen. Sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut merupakan sektor basis berdasarkan analisis LQ, kuadran I atau II menurut analisis *Shift Share*, dan kuadran I menurut analisis tipologi Klassen. Jika hanya salah satu masuk pada kriteria, maka kategori tersebut dikatakan sebagai sektor potensial, dan jika tidak memenuhi kriteria dari ketiga analisis tersebut maka dikatakan non-unggulan.

Pada tahap LQ, sektor dikatakan basis jika mempunyai nilai LQ di atas 1. Pada *shift share*, sektor kuadran I adalah sektor yang mengalami pertumbuhan cepat dan memiliki daya saing tinggi, dan sektor kuadran II adalah sektor yang mengalami pertumbuhan lambat namun memiliki daya saing tinggi. Sementara pada tipologi Klassen, sektor kuadran I jika mempunyai kontribusi dan pertumbuhan lebih dari Provinsi Riau.

Berdasarkan Analisis *Overlay Base Economic Approach*, kategori yang tergolong sebagai sektor unggulan, yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E). Sementara itu, 1 kategori lain yang menjadi basis ekonomi Kabupaten Bengkalis dan masuk sebagai sektor yang potensial adalah Pertambangan dan Penggalian. Sementara itu untuk kategori lainnya masuk sebagai sektor non-unggulan.

Tabel 4.5
Analisis *Overlay Base Economic Approach* Kabupaten Bengkalis, 2023

Kategori	Uraian	LQ	Shift Share	Tipologi Klassen	MRP	Overlay Analysis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Non Basis	II	III	III	Non-Unggulan
B	Pertambangan dan Penggalian	Basis	IV	II	IV	Potensial
C	Industri Pengolahan	Non Basis	IV	IV	IV	Non-Unggulan
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Non Basis	II	III	III	Non-Unggulan
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Basis	I	I	I	Unggulan
F	Konstruksi	Non Basis	III	IV	II	Non-Unggulan

Kategori	Uraian	LQ	Shift Share	Tipologi Klassen	MRP	Overlay Analysis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G	Perdagangan Besar dan Ecerean; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Non Basis	III	IV	II	Non-Unggulan
H	Transportasi dan Pergudangan	Non Basis	III	IV	II	Non-Unggulan
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Non Basis	III	IV	II	Non-Unggulan
J	Informasi dan Komunikasi	Non Basis	I	III	I	Potensial
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Non Basis	II	III	III	Non-Unggulan
L	Real Estate	Non Basis	IV	IV	IV	Non-Unggulan
M,N	Jasa Perusahaan	Non Basis	III	IV	II	Non-Unggulan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Non Basis	I	III	I	Non-Unggulan
P	Jasa Pendidikan	Non Basis	IV	IV	IV	Non-Unggulan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Non Basis	III	IV	II	Non-Unggulan
R,S,T,U	Jasa Lainnya	Non Basis	I	III	I	Non-Unggulan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu, diolah

BAB 5

PENUTUP

5 Lapangan Usaha dengan PDRB terbesar

1 | B

Pertambangan dan Pengolahan

2 | C

Industri Pengolahan

3 | A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

4 | G

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor

5 | F

Konstruksi

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu Pertambangan dan Penggalian (B), Industri Pengolahan (C), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (G), dan Konstruksi (F).
2. Dari 17 lapangan usaha, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif.
3. Potensi Kabupaten Bengkalis berdasarkan pengukuran alat analisis yaitu LQ, Tipologi Klassen, Model Rasio Pertumbuhan, *Shift Share* dan *Overlay Base Economic Approach* menunjukkan bahwa lapangan usaha unggulan di Kabupaten Bengkalis adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E). Kategori Pertambangan dan Penggalian (B), Informasi dan Komunikasi (J), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O), dan Jasa Lainnya (R, S, T, U) tercatat sebagai sektor potensial, sehingga perlu didorong karena potensi yang dimilikinya sangat besar, sebagai penopang ekonomi Bengkalis.

5.2 Saran

Pemerintah perlu memberi perhatian terhadap perencanaan dan kebijakan pembangunan dengan prioritas pada lapangan usaha unggulan dan potensi dengan tetap memperhatikan kategori selebihnya secara proporsional. Penentuan lapangan usaha unggulan dapat menjadi titik awal arah kebijakan yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan produktivitas dan profesionalisme dalam mengelola sektor potensi agar memiliki keunggulan sehingga meningkatkan nilai tambah perekonomian Kabupaten Bengkalis. Semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi terkait penentuan lapangan usaha unggulan di Kabupaten Bengkalis dan dapat dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. 2024. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023. BPS: Kabupaten Bengkalis.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. 2024. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023. BPS: Kabupaten Bengkalis.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2024. Laporan Perekonomian Provinsi Riau 2023. BPS: Provinsi Riau.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2024. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023. BPS: Provinsi Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau (Miliar Rupiah), 2023

Kategori	Lapangan Usaha	Bengkalis	Riau
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.483	269.938
B	Pertambangan dan Penggalian	99.717	203.008
C	Industri Pengolahan	26.403	282.789
D	Pengadaan Listrik dan Gas	54	830
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20	102
F	Konstruksi	5.961	99.416
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.825	105.304
H	Transportasi dan Pergudangan	439	8.544
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	463	4.824
J	Informasi dan Komunikasi	689	8.193
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	501	9.692
L	Real Estate	495	8.531
M,N	Jasa Perusahaan	6	47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.477	13.224
P	Jasa Pendidikan	508	5.077
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174	2.514
R,S,T,U	Jasa Lainnya	422	4.439
Produk Domestik Regional Bruto		168.636	1.026.472

Lampiran 2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau (Persen), 2023

Kategori	Lapangan Usaha	Bengkalis	Riau
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,88	3,23
B	Pertambangan dan Penggalian	2,08	2,52
C	Industri Pengolahan	1,21	3,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,63	1,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,86	5,52
F	Konstruksi	8,02	9,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,76	6,12
H	Transportasi dan Pergudangan	5,29	8,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,58	4,22
J	Informasi dan Komunikasi	8,97	7,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,43	4,07
L	Real Estate	2,97	3,94
M,N	Jasa Perusahaan	6,29	6,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,77	5,40
P	Jasa Pendidikan	3,09	3,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,02	6,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,39	6,26
Produk Domestik Regional Bruto		2,77	4,21

Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau (Persen), 2023

Kategori	Lapangan Usaha	Bengkalis	Riau
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,55	26,30
B	Pertambangan dan Penggalian	59,13	19,78
C	Industri Pengolahan	15,66	27,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01
F	Konstruksi	3,53	9,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,01	10,26
H	Transportasi dan Pergudangan	0,26	0,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27	0,47
J	Informasi dan Komunikasi	0,41	0,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,30	0,94
L	Real Estate	0,29	0,83
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,88	1,29
P	Jasa Pendidikan	0,30	0,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,10	0,24
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,25	0,43
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00

<https://bengkaliskab.bps.go.id>



SENSUS
EKONOMI
2026

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS

Jalan Antara 439 Bengkalis, Riau

Website: <https://bengkaliskab.bps.go.id>

Email: bps1408@bps.go.id